BAB IV

ALASAN UNDP MENETAPKAN PROVINSI GORONTALO DALAM PROGRAM ART GOLD

UNDP memilih Provinsi Gorontalo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian.

Pelaksanaan program dari UNDP yang dinamakan ART Gold atau inisiatif kerjasama yang diterapkan di provinsi Gorontalo dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Gorontalo mempunyai komoditas unggulan pada sektor pertanian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program UNDP merupakan program kerjasama maka perlunya daerah yang lain untuk dijadikan partner dari provinsi Gorontalo, dan dalam hal ini UNDP memilih provinsi Southern di Srilanka, karena daerah ini juga memiliki komoditas unggulan yang sama dengan provinsi Gorontalo di bidang pertanian.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak UNDP di provinsi Gorontalo, provinsi Gorontalo dan provinsi Southern bekerjasama untuk saling melengkapi komoditas unggulannya dalam bidang pertanian. Dalam hal ini provinsi Gorontalo memiliki keunggulan dalam pengelolaan jagung sedangkan provinsi Southern unggul dalam penerapan sistem asuransi pertanian yang sudah lama diterapkan di provinsi tersebut.

Teori kerjasama internasional menjelaskan bahwa kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut provinsi Gorontalo dan provinsi Southern ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan program kerjasama

karena kedua daerah memiliki kepentingan atau visi yang sama tentang bagaimana membangun daerahnya dalam pengembangan komoditas yang sama dan menjadi unggulannya di bidang pertanian.

Di provinsi Gorontalo sendiri dalam mencapai target pertama dalam kriteria ekonomi yang sehat, pemerintah provinsi Gorontalo mencanangkan program Agropolitan berbasiskan komoditi jagung, yang dianggap nantinya menjadi lokomotif pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini juga tidak lain adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang hakiki yaitu menuju kepada ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam perjalanannya pembangunan pertanian melalui program agropolitan berbasiskan komoditi jagung telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya melebihi angka rata-rata nasional. Provinsi Gorontalo sendiri mempunyai beberapa strategi pembangunan pertanian.

Untuk mewujudkan pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo, dikenal 9 faktor yang merupakan 9 pilar strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui program agropolitan. Ke 9 pilar ini telah dilakukan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada, juga telah ditetapkan sebagai indikator pertanian modern yang akan dicapai.

Adapun sembilan pilar tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Pengembangan dan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta Angkutan Agropolitan.
b. Menyediaan dana penjaminan petani (APBN + APBD + ASKRINDO + Bank BRI +Bank Mandiri + Bank BNI).
c. Penyediaan benih / bibit unggul, pupuk dan pengendalian hama penyakit.
d. Memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMD.

e. Pembangunan penyediaan irigasi dan Jalan Akses Agropolitan.

f. Percontohan / Show Window disetiap Kabupaten / Kota serta Posko Agropolitan.

g. Peningkatan SDM Pertanian.

h. Meningkatkan peran maize center dalam penelitian pengkajian teknologi serta penerapan teknologi baru.

i. Perencanaan dan koordinasi.

Dengan strategi diatas, hasil pembangunan pertanian khususnya angka produksi komoditi penghasil kalori utama masyarakat yaitu komoditi jagung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk komoditi jagung yang dianggap sebagai lokomotif pembangunan diwilayah Provinsi Gorontalo dapat dilihat perkembangannya seperti pada grafik dibawah ini.

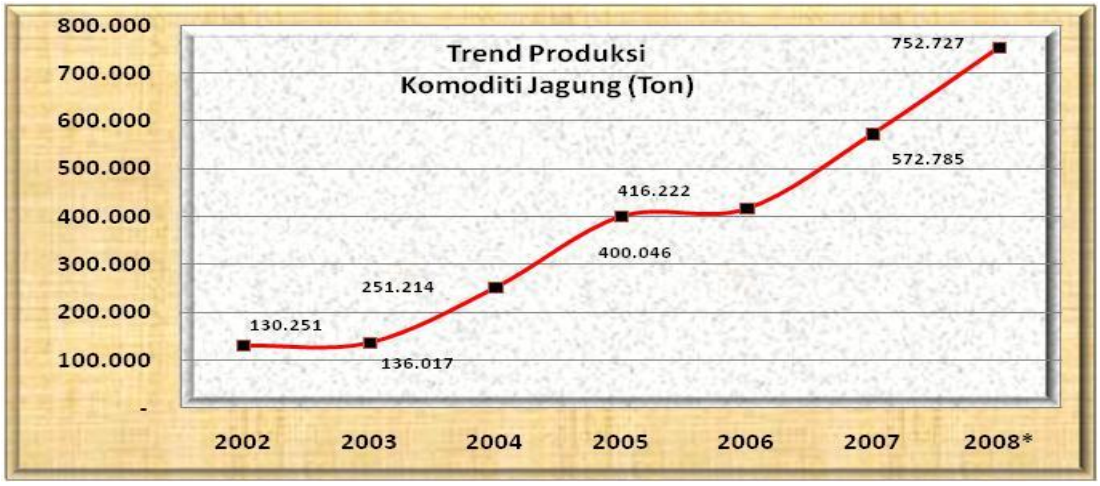

Dengan pertumbuhan produksi seperti grafik dibawah ini :

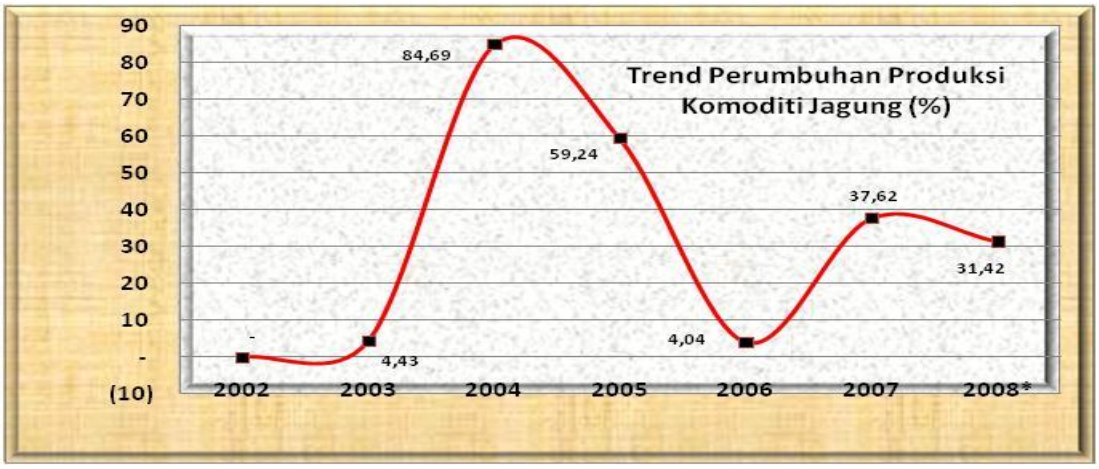

Pencapaian produksi diatas karena didukung oleh luas panen seperti pada grafik dibawah ini :

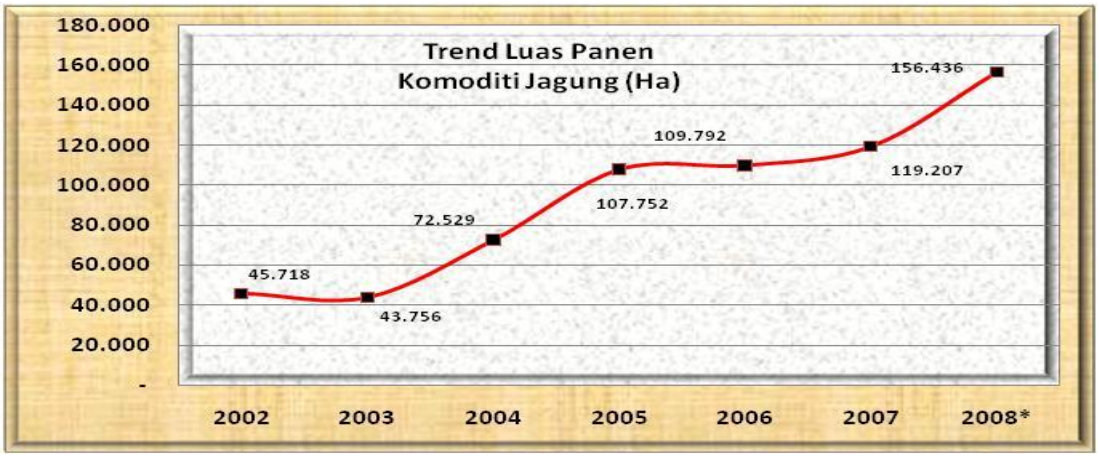

Dengan grafik pertumbuhannya sebagai berikut :

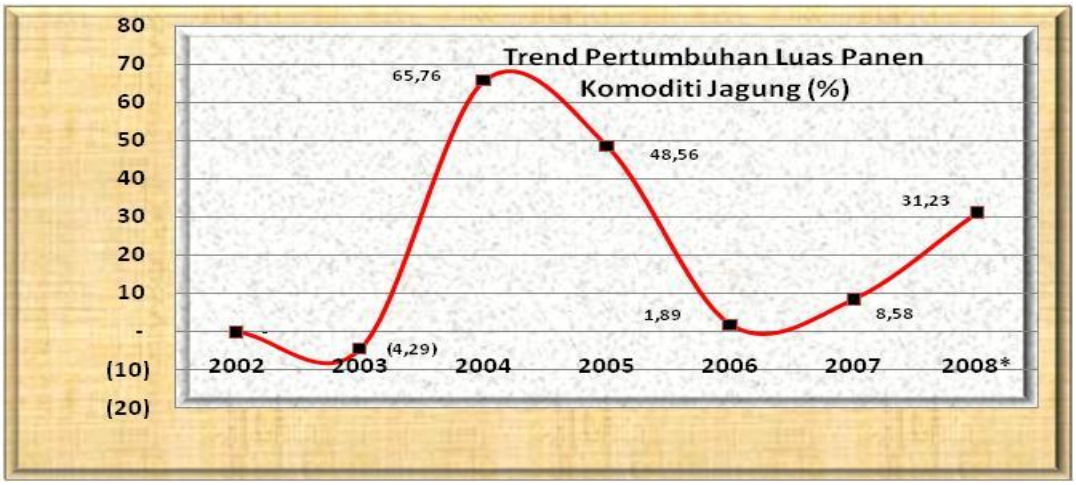

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa target pembangunan ekonomi wilayah dengan pertanian sebagai lokomotif pembangunan wilayah, dapat katakan cukup fantastis. Hal ini lebih didukung oleh peningkatan ekspor dan antar pulau setiap tahun yang dilakukan oleh para pengusaha lokal daerah, dengan angka rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan angka 132 %. Berdasarkan laporan BPS pada tahun 2008, nilai devisa negara yang dihasilkan oleh ekspor komoditi yang berasal dari wilayah gorontalo menghasilkan 24 juta US dollar, dan sumbangan komoditi jagung sebesar 65 % dari angka tersebut. Sedangkan nilai tukar petani, berdasarkan pemantauan dari pihak BPS, untuk tahun 2008, setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tingginya pendapatan masyarakat yang lebih banyak disumbang oleh sektor pertanian. (Najamuddin, 2008).

Dari data di atas tadi tentang program pertanian provinsi Gorontalo dan pencapaian hasil dari program tersebut tentunya semua itu merupakan keunggulan yang dimiliki provinsi Gorontalo dalam bidang pertanian. Akan tetapi dalam rangka membangun dan mengembangkan daerah dari satu bidang yang menjadi unggulannya seperti pertanian perlu adanya dukungan dari pihak lain dalam ini organisasi internasional maupun provinsi yang ada di luar negeri. Melalui kerjasama

internasional kepentingan yang ingin dicapai oeh provinsi Gorontalo akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

Selanjutnya ditetapkannya provinsi Southern sebagai mitra kerjasama oleh UNDP sama halnya dengan provinsi Gorontalo bahwa provinsi Southern juga memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, akan tetapi provinsi Southern lebih kepada penerapan sistem pertaniannya yaitu sistem asuransi pertanian. Pengembangan program asuransi untuk pertanian di provinsi Southern sudah dikembangkan sejak tahun 1973 yang dimulai oleh 1 komoditi yaitu padi, dan saat ini sudah ada beberapa komoditi yang dikembangkan seperti cokelat, teh, karet, tebu, jagung dan lain sebagainya. Asuransi pertanian ini menyediakan perlindungan dari kerugian sepeti bencana alam sehingga dapat memberikan jaminan kepastian kepada petani dalam hal keuangan yaitu hasil panen dan semuanya itu juga dijamin oleh negara.

Asuransi pertanian ini juga berguna bagi masyarakat yang ingin mempunyai lahan, para investor, koordinator proyek, dan pemerintah. Disamping itu asuransi pertanian ini juga dapat memberikan jaminan kepada Bank ketika para petani ingin mengajukan pinjaman kredit sehingga hal ini dapat menjadi solusi ketika sulitnya para petani mendapatkan pinjaman kredit dari Bank. Di Srilanka sendiri setidaknya sudah ada 9 Asuransi yang mengembangkan Asuransi pertanian dan tergabung dalam Agricultural & Agrarian Insurance Board (AAIB).

Ada beberapa tipe dari Asuransi pertanian yang dikembangkan di Srilanka diantaranya :

a. Asuransi tanaman
b. Asuransi perkebunan
c. Asuransi perikanan
d. Asuransi holtikutural
e. Asuransi peternakan ulet sutera

f. Asuransi peternakan sapi, kambing, domba,dan unggas

Selain itu asuransi pertanian ini harus mencakup industri asuransi, pertanian, petani dan pemilik modal dengan mempertimbangkan bagaimana asuransi pertanian ini bisa masuk sampai ke pelosok desa dan juga dapat menghubungkannya dengan pihak perbankan, pembayaran premi yang adil dan juga penanganan klaim yang cepat. Untuk itu perlu dilakukan indentifikasi pasar, keuntungan yang dapat diperoleh para petani dan pihak asuransi dan menghitung bagaimana cash flownya.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah permintaan pasar dan bagaimana kondisi dari permintaan tersebut serta daya beli petani itu sendiri. Oeh karena itu perlu dibuat suatu sistem pembayaran dan perhitungan premi yang tepat oleh tenaga ahli. Namun jika tidak ada tenaga ahli, bisa juga berdasarkan data-data dari pemerintah khususnya dinas pertanian. Premi yang dibebankan berbeda-beda tergantung jenis tanaman, waktu tanam dan resikonya.(Satwa, 2010).

Berdasarkan alasan di atas mengapa UNDP memilih provinsi Gorontalo dan provinsi Southern untuk dijadiakan tempat pelaksanaan program kerjasama karena kepentingan atau visi misi yang sama dari kedua provinsi tentang pengembangan komoditas unggulannya di bidang pertanian. Dalam mengembangkan keunggulan provinsi Gorontalo dalam pengelolaan jagung perlu di topang oleh sistem asuransi yang mengatur dan melindungi hak-hak para petani dan juga sebaliknya untuk mencapai pembangunan melalui program agropolitan berbasiskan komoditi jagung provinsi Southern perlu mempelajari dan menerapakan sistem atau strategi pembangunan pertanian provinsi Gorontalo.

Berkaitan dengan hal ini dalam pelaksanaan kerjasama nantinya akan menghasilkan suatu kerjasama yang baik dan pastinya saling menguntungkan antara kedua provinsi. UNDP pun sebagai organisasi yang membantu pencapaian pembangunan di Indonesia dan Sri Lanka melalui provinsi Gorontalo dan Southern juga akan lebih mudah untuk mencapai targetnya.

2. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terus berkembang dalam pembangunan ekonominya.

Provinsi Gorontalo tentunya merupakan provinsi yang masih berumur sangat muda dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sejak di tetapkannya provinsi Gorontalo sebagai daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000, provinsi Gorontalo terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang dan lebih ditekankan pada pembangunan ekonominya.

Dalam konsep pembangunan sendiri pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Provinsi Gorontalo meskipun berumur belum genap 10 tahun, tetapi prestasinya jauh lebih baik daripada daerah otonom lainnya yang lebih tua. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan Provinsi Gorontolo sendri dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia (pada 2006 sebesar 68,98 menjadi 69,79 pada 2009), pertumbuhan ekonomi (pada 2006 sebesar 7,06 % menjadi 7,63 % pada 2009), serta penurunan angka kemiskinan hingga 23,19 % pada 2010.(Riyadi, 2008).

Mewujudkan masyrakat yang kritis dan mengerti akan partisipasinya dalam pembangunan, tak bisa dilepaskan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui dalam prioritas pemerataan pembangunan di suatu daerah, kebijakan pembangunannya diadakan pada peran serta masyarakat sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pengejawantahan dari pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan demi kemakmuran serta kesejahteran rakyat.

Adapun pokok-pokok dan strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dikembangakan di berbagai daerah antara lain : Pertama, penanggulangan kemiskinan, dimana perlu peran serta masyarakat dalam bentuk kemitraan yang berwawasan kebangsaan. Kedua, penajaman program yang diarahkan untuk peningkatan kegiatan yang berorientasi pada perbaikan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Ketiga, memecahkan keterbelakangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk maju, mandiri serta sejahtera. Sasaran dari semua itu adalah ekonomi, masyaraakat dan peningkatan pendapatan agar masyarakat miskin bias turun jumlahnya.

Dalam perjalanannya selama beberapa tahun semenjak pisah dari provinsi Sulut, pemerintah provinsi Gorontalo boleh di bilang sangat konsisten dalam masalah mengentaskan kemiskinan. Lihat saja dari data yang dikeluarkan Bappeda provinsi Gorontalo, dimana pada awalnya jumlah kemiskinan yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo adalah sebesar 72% dari 848 ribu jumlah penduduk Gorontalo sejak pisah dari provinsi Sulut. Kini angka tersebut mulai menyusut seiring dengan majudan berkembangnya program pemerintah khususnya di sektor pertanian dengan entry point jagung serta perikanan, hingga 29%-33% saja sebagaimana data yang disampaikan oleh BPS dan BKKBN provinsi Gorontalo. (Sabar, 2006).

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari hanya sedikit daerah pemekaran dengan geliat pembangunan yang sangat dinamis. Data indikator makro memperlihatkan trend kenaikan yang

cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi perkembangan sektor riil, indikator pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 5%, dan/atau rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di regio Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara.

Berkaitan dengan data perkembangan daerah di atas, provinsi Gorontalo telah dapat dikatakan mampu melakukan pembangunan daerah dengan sangat baik. Provinsi Gorontalo telah mampu melakukan perubahan-perubahan besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu kriteria keberhasilan daerah atau provinsi dalam melakukan pembangunan.

Selanjutnya mengapa provinsi Gorontalo dalam program kerjasama ini disandingkan dengan provinsi Southern di Sri Lanka karena provinsi Southern sendiri cukup berhasil dalam melakukan pembangunan daerahnya. Provinsi Southern sendiri terus melakukan pembangunan pada visi misi yang mengandalkan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan. Pendapatan Rata-Rata Provinsi di Sri Lanka provinsi Western Rs. 64,944, provinsi Central Rs. 38,558 provinsi **Southern** Rs. **41,816**, provinsi Northern Rs. 37,503, provinsi Eastern Rs. 28,113, provinsi North Western Rs. 46,253, provinsi North Central Rs. 35,771, provinsi Uva Rs. 40,664 dan provinsi Sabaragamuwa Rs. 36,379. Rata-rata Nasional Rs. 41.111. (Sudewa, 2015).

Berdasarkan datadiatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan rata2 provinsi Southern menempati urutan ketiga pendapatan terbesar dan lebih tinggi dari rata2 pendapatan nasional. Hal tersebut menjadikan provinsi Southern sebagai provinsi yang tidak termasuk kategori provinsi yang miskin dinegaranya dalam artian lainnya provinsi yang pembangunan ekonominya baik.

Kemudian dalam data rasio Rasio Konsumsi Makanan di masing- masing provinsi Sri Lanka, Provinsi Western 30,6%, Provinsi Central 41,2%, Provinsi **Southern** 37,8%, Provinsi Northern 44,8%, Provinsi Eastern 55,0%, Provinsi North Western 41,3%, Provinsi North Central 41,1%, Provinsi Uva 41,7% dan Provinsi Sabaragamuwa 43,2%. Rata-rata Nasional 37,6%. (Sudewa, 2015).

Data menunjukkan penduduk Provinsi Utara sebagai provinsi yang menghabiskan sekitar 55,0% dari pendapatanya untuk konsumsi makanan dan paling banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain. Hal tersebut adalah tanda dari adanya kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2012), bahwa suatu masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk tabungan dan investasi. Dengan tidak adanya investasi dan tabungan maka peluang untuk terciptanya kesejahteraan dalam suatu masyarakat akan menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya arus perputaran modal dalam sektor produktif. (Sudewa, 2015).

Data di atas juga menunjukan bahwa provinsi Southern merupakan provinsi yang tergolong dalam provinsi-provinsi di Sri Lanka yang menghabiskan pendapatannya lebih sedikit yaitu sekitar 37,8% untuk konsumsi makanan. Hal tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa provinsi Southern jauh dari katagori provinsi yang miskin dinegaranya atau telah mampu melakukan pembangunan ekonomi dengan baik.

Pembangunan disuatu daerah atau provinsi juga dapat di dukung oleh kecakapan kepemimpinan Gubernur yang sangat inovatif. Dalam hal ini peneliti menambahkan bahwa UNDP memilih provinsi Gorontalo dan provinsi Southern dilatarbelakangi juga dengan kecapakan kepemimpinan gubernur provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi Gorontalo pada saat itu memandang perlunya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak asing baik itu pemerintah daerah

yang berada di luar negeri maupun lembaga donor seperti organisasi internasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tentunya sangat diperlukan inovasi yang lebih dari kepemimpinan gubernur sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut kerjasama yang terjalin dikedua provinsi ini merupakan salah satu program pemerintah daerah yang dapat dikatakan inovatif dan cerdas. Dalam pertemuan Konvensi Internasional II mengenai Pendekatan Regional dan Lokal untuk Pembangunan (Second International Convention on a Regional and Local Approach to Development) di Tangiers-Tetouan Maroko, 12-14 Mei 2008 menjadi cikal bakal dipilihnya provinsi Gorontalo dan provinsi Southern.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dan datang dari 56 negara di Eropa, Amerika, Arika dan Asia itu, Gubernur provinsi Gorontalo pada saat itu Fadel Muhammad menceritakan bagaimana Gorontalo menapaki pembangunan daerah sejak awal berdiri. Keberhasilan Gorontalo, ungkap Fadel, dimulai dengan komitmen menerapkan model pemerintah wirausaha (entrepreneurial government) yang diilhami oleh gerakan pembaharuan tata pemerintahan baru (NPM) yang sudah diadopsi di negara-negara maju. "Gorontalo kemudian membuat konsep pembangunan yang fokus hanya pada tiga program unggulan (SDM, pertanian dan perikanan, sehingga sasaran dan target pembangunan lebih mudah dicapai," kata Fadel.

Fadel mengungkapkan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari inisiatif Gorontalo menjalin kerjasama dengan pihak donor internasional seperti Bank Dunia, UNDP, JICA, CIDA, dll. Kita harus membangun daerah dengan semangat kerjasama hingga ke tingkat internasional tegas Fadel. Untuk itu, Fadel menawarkan kerjasama regional dengan para pemimpin region yang hadir pada

pertemuan tersebut dan mendapat respons positiif dari beberapa peserta. Gubernur Southern Province di Srinlanka, Kumari Balasuriya, bahkan mengundang Fadel dan rombngan ke Srinlanka sekaligus dalam rangka menjajaki kerjasama diberbagai bidang pembangunan. (Polapa, 2008).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah dari berbagai negara inilah UNDP melirik provinsi Gorontalo dan provinsi Southern untuk dijadikan tempat pelaksanaan program kerjasama dengan memfasilitasi kerjasama tersebut baik itu bersifat pertemuan dan bentuk bantuan dana sebesar US$3 juta. Keinginan yang kuat dan visi misi yang sangat pro inovasi dari kedua pemerintah provinsi yang mendorong UNDP untuk memilih provinsi Gorontalo dan Southern di Sri Lanka dijadikan tempat pelaksanaan program kerjasama.

Gubernur Provinsi Gorontalo pada saat itu Fadel Muhammad telah mampu membawa provinsi Gorontalo yang pada saat itu masih berumur sangat mudah sejajar dengan provinsi yang telah lebih awal melakukan pembangunan. Salah satu program pembangunan yang diterapkan Fadel Muhammad yaitu pengembangan pertanian (agropolitan) dengan komoditas jagungsebagai entry point, dimana telah mendapat pengakuan nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden SBY dan Presiden Gambia ke Gorontalo. Bukan Cuma itu, dengan keberhasilan tersebut gubernur Gorontalo dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Jagung Nasional (DJN).

Perkembangan di bidang ini dibuktikan dengan eksport jagung tahun 2001 sebanyak 6.300 ton, tahun 2002 naik menjadi 5.700 ton. Kemudian pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 18,95 ton. Berikutnya tahun 2004 menjadi 12.310 ton. Dan untuk tahun 2005 melonjak lagi menjadi 35.960 ton. Prestasi ini tentunya merupakan dampak dari kepemimpinan Gubernur yang sangat inovatif dan produktif.

Di tingkat regional pengakuan masyarakat Sulawesi kepada Fadel Muhammad juga cukup apresiatif dengan dipercayanya menjadi Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) serta Wakil Ketua sekaligus juru bicara (jubir) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Nah, dengan keberhasilantersebut pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah berhasil menggelar event-event seperti seminar yang pertama kali digelar di Gorontalo, yakni Workshop of Maize Gorontalo yang bertujuan untuk mempromosikan partnership in development yang dihadiri berbagai kalangan luar negeri. Selanjutnya dalam pengembangan bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2006 provinsi Gorontalo sudah dapat langsung mengeksport produksi ikannya ke luar negeri dengan pesawat cargo. (Sabar, 2006).